



MULTIKULTURALITAS DAN NARASI PRIMORDIAL DALAM POLITIK ELEKTORAL INDONESIA

Adrianus Aman, Pius Pandor

Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang

Email: adrcmid@gmail.com, piuspandor@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to examine primordial issues in electoral political contestation in a plural Indonesian society. Electoral political contestation became a breeding ground for primordial issues. The majority wants to be led by a leader who is of the majority religion. Religious and tribal issues are used to win political contests. Indigenous and pagan narratives are echoed and lead to division. This article uses qualitative methodology with a leterer study approach referring to Emmanuel Levinas' ethical theory of responsibility for analyzing data. The levinian ethic of responsibility expresses the idea of placing others as unique and different subjects altogether through their visible faces. The consequence is that the other must be respected and valued as subjects. At the same time the presence of others becomes the responsibility of "me", not absorbing others to equate with myself or even subjugate or master. Data is obtained from internet searches such as news and surveys conducted by LSI (Indonesian Survey Institute). This article finds that the understanding of politics is reduced only to the understanding of electoral political contestation alone. Politik lost its meaning as a form of living together to achieve the common good (Bonum Commune). The article proposes that Indonesian education incorporate political education into the national education curriculum and multicultural education is further emphasized in schools so that primordial issues do not develop rapidly, and future generations can accept Indonesia's plural reality.

Keywords: Primordial, Multicultural Education, Others, Politics, Majority-Minority

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau memiliki kultur masing-masing. Hal ini berarti Indonesia sangat kental dengan perbedaan kultur. Usaha yang telah dilakukan oleh pendiri negara Indonesia untuk menyatukan perbedaan ini adalah dengan mencetuskan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" berbeda-beda tetapi tetap satu, memimpikan Indonesia yang menjunjung

tinggi perbedaan dan persatuan. Akan tetapi mimpi itu hanyalah tinggal mimpi. Hari-hari ini Indonesia menjadi ladang pertikaian karena perbedaan, baik perbedaan kultur, agama, maupun perbedaan pandangan. Hari ini perbedaan merupakan biang dari runtuhnya perdamaian di Indonesia.

Isu politik di Indonesia kerap menjadi penyulut petaka perdamaian. Dalam hal ini isu politik kerap dijadikan alat pemecah bela bangsa. Bukan hal baru bagi Indonesia jika politik merupakan alat yang ampuh untuk memecah bela



bangsa. Sejak zaman kolonila Belanda Indonesia mempraktikan hal tersebut. Belanda atau kaum imperialisme masuk ke Indonesia dengan sambutan hangat dari para pemimpin yaitu para raja. Mereka diberi makan oleh kaum imperialis. Akan tetapi mereka lupa diri bahwa mereka sedang dijajah atau sedang diperas. Peristiwa G 30S PKI adalah lanjutannya. Pengkudetaan kekuasaan presiden melalui SUPERSEMAR oleh Soeharto, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Indonesia cukup kenyang dengan kerusuhan yang berlatar belakang politik. Bahkan sampai hari ini kasus tersebut belum selesai sampai tuntas. Kasus pelanggaran HAM 1998 adalah contohnya.

Pemilu 2019 adalah periode selanjutnya. Apakah Indonesia mau mempertahankan identitasnya. Sejarah mengajarkan banyak hal, akan tetapi tidak pernah dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di lain pihak melalui pendidikan formal, kurikulum Indonesia memasukan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan budi pekerti yang membangun karakter bangsa, bukan pengecut, pecundang atau pengkhianat negara.

Indonesia menamakan diri sebagai negara yang paling religius di dunia. Akan tetapi Indoensia di huni oleh preman-preman agamis. Agama dijadikan senjata untuk membenarkan segala tindakan keji termasuk untuk kepentingan politik kotor. Agama dijadikan alat untuk memecah bela dan semakin membedakan-bedakan manusia

berdasarkan keyakinan. Konsekuensi lebih lanjutnya adalah munculnya kaum fundamental, radikal, rasial, dan fanatik. Pada Pilgub DKI Jakarta 2017 narasi primordial, seperti kata Pribumi, Kafir dipakai untuk kepentingan politik elektoral, hingga kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok salah satu calon gubernur.

Kerangka Teori

Penulisan artikel ini menggunakan teori etika tanggung jawab Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, filsuf Yahudi asal Prancis, adalah orang pertama yang pemikirannya menandai pergeseran penting dari ontologi ke etika, dari metafisika yang memprioritaskan *logos* ke metafisika yang mengedepankan *loxos*, dari sejarah yang terpusat pada ego, ke sejarah yang mengawali lahirnya *the ohter* atau “Yang Lain.”¹ Levinas menggambarkan “Yang Lain” sebagai pendobrak atau pembuka cakrawala menuju transendenitasku. Manusia terasing dari manusia Yang Lainnya. Aku terasing dari dia dan Yang Lain. Aku mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Yang Lain. Bagi Levinas perjumpaan aku dengan Yang Lain membutuhkan media atau jembatan yang dinamainya dengan perjumpaan etis.² Perjumpaan etis dipahami sebagai perjumpaan aku dengan Yang Lain, yaitu orang lain, sesama manusia, pribadi Yang Lain sebagai person dalam keluhuran martabatnya. Di sisi lain, “Yang Lain” dapat juga dimengerti sebagai mereka yang “Aku” anggap sebagai obyek, yang aku rangkul secara utuh.

¹ Achmad Fawaid, *Perjumpaan Etis Wajah Liyan: Membaca Karya Sastra dengan Etika Levinasian*: Poetika, 2013, 1(2),

² *Ibid.*,

Ahmad Jauhari dalam artikelnya yang berjudul Konsep Metafisika Emmanuel Levinas menerangkan siapa itu “*the other*.” Ia menerangkan bahwa dalam metafisika Levinas ada tiga kata kunci yang harus dipahami dengan baik yaitu Totalitas, Tak Berhingga, dan Eskterioritas. Term totalitas dalam metafisika Levinas memiliki bernada kurang baik. Dalam gagasan totalitas Levinas memulai perjalanan filsafatnya berawal dari “Aku” “ego.” Pola pikir seperti ini menurut Levinas disebut sebagai *la philosophie Mème* (*The Philosophy of the same*).³ Filsafat yang merujuk pada ego berarti mengulang kembali gagasan dalam filsafat modern yang dimulai oleh Descartes dan Yang Lain-nya. Totalitas Levinas masih menyusup dalam pemikiran Husserl maupun Sartre, yang memahami Ada sebagai imanensi atau interioritas (Jauhari, 2016).⁴ Lebih lanjut term totalitas ini, runtuh dengan munculnya gagasan yang tak berhingga. Apa itu yang tak berhingga? Yang Tak Berhingga itu adalah orang lain (*Autrui, I’Autre*) (Jauhari, 2016).⁵ Aku yang memikirkan diriku hancur dengan kehadiran “Yang Lain.” Yang Lain yang tampil di hadapanku sama sekali lain dan unik. Orang lain bagi Levinas merupakan fenomena *sui generis*, suatu fenomena yang unik sama sekali.⁶ Bagi Levinas, Yang Lain berada di luar Aku. Yang Lain memiliki keluasan, sesuatu yang eksterior, transenden, melampaui kesadaran dan dunia ego. Yang Lain bukanlah alter ego atau aku Yang Lain.

Dalam konteks ini, ia mengkritik gagasan dalam tradisi filsafat yang mengabsolutkan ego.⁷ Di sisi lain, Levinas juga mengatakan bahwa “Yang Lain” adalah sama sekali berbeda, ia lain sama sekali (*the wholly other*), yang tidak dapat dipikirkan dalam kerangka ontologi dan metafisika yang disebutnya Allah. Bagaimana aku mengetahui “Yang Lain”? Levinas mengatakan kehadiran “Yang Lain” tampak melalui wajahnya. Wajah dalam gagasan Levinas tidak dipahami sebagai wajah fisik melainkan wajah dalam arti ontologis bahkan melampaui ontologi. Wajah itu hadir dalam penolakannya untuk direngkuh. Wajah yang menggugatku untuk keluar dari subyektivitasku, memaksaku untuk menyapanya, dan menyapanya secara etis.

Simon dalam artikelnya yang berjudul “Yang Lain” Dalam Pemikiran Levinas dan Ricoeur terkait prinsip hidup bermasyarakat (John C. Simon, 2018), menerangkan bahwa Levinas dan Ricoeur menolong kita mengonstruksi sebuah teologi politik yang berbasis pada pengalaman dan berisikan tanggung jawab atas hidup orang lain. Perspektif tindakan etis asimetris Levinas dan simetris-resiprokal Ricoeur sama-sama diarahkan pada Yang Lain yang menderita dan ditinggirkan. Yang pertama menuntut tanggung jawab etis sebagai Aku yang ada untuk Yang Lain tanpa menuntut yang sama dan sebaliknya. Apa yang Aku lakukan pada orang lain tidak boleh Aku menuntut

³ Ahmand Jauhari, *Konsep Metafisik Emmanuel Levinas: YAQZHAN*, 2016, 2 (1)

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

⁶ Achmad Fawaid, 2013

⁷ Bdk, Achmad Fawaid, 2013; Armada Riyanto, *Berkat dari Liyan dan Kemanusiaan Indonesia*, dalam Armada Riyanto, dkk, *Kearifan Lokal Pancasila dan Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2015, hal. 165-177.

sebaliknya. Yang kedua berupa tanggung jawab sebagai tindakan etis yang diusahakan bersama (resiprokal) hingga dikongkretkan dalam institusi-institusi hidup seperti negara demokratis untuk mewujudkan keadilan.⁸ Simon menerjemahkan perilaku ekonomi adil menurut Levinas sebagai tindakan etis yang bertanggung jawab atas hidup orang lain yang berarti membuka diri atau membuka rumah sendiri untuk menerima kehadiran “Yang Lain”.⁹ Tindakan etis ini berarti tindakan yang tidak lagi berpusat pada “Aku.”

Pembahasan

Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu, ada isu primordial yang menciderai multikultural Indoensia. Narasi primordial yang dibangun adalah narasi kafir dan non pribumi. Kendati narasi ini tidak mampu mengalahkan lawan politik masuklah isu penistaan agama. Lembaga Survei Indonesia (LSI) mempublikasikan hasil penelitian tentang intoleransi. Berdasarkan hasil survei LSI pada 2018, sikap intoleransi masih ada, belum ada perubahan dari tahu sebelumnya.¹⁰ Hasil survei LSI (2018) menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat Muslim keberatan jika orang non Muslim menjadi kepadal Daerah atau Presiden. Hal serupa juga terjadi dengan pembangunan rumah ibadah, 53% keberartan jika rumah ibadah non Muslim dibangun di sekitar mereka. Di sisi lain 54% masyarakat Muslim tidak keberatan

jika masyarakat non Muslim mengadakan kegiatan keagamaan di sekitar mereka, namun yang merasa keberatan juga cukup tinggi yaitu 36.4%. Di lain pihak umat Muslim setuju jika umat non muslim mengikuti kemauan agama mayoritas yaitu Islam. Sebaliknya umat Muslim tidak setuju jika mereka mengikuti kemauan agama mayoritas di tempat atau negara yang minoritas Muslim. Hal demikian merambah ke politik, di mana umat Muslim (67.4%) sangat setuju agar pemerintah mengutamakan Islam dalam menjalankan dalam berbangsa dan bernegara. Sebaliknya umat non Muslim tidak keberatan yang berada di angka lebih 60% jika pemerintahan dipimpin oleh orang Muslim.

Dalam diskusi hasil penelitian para ahli LIPI, Prof. Syarif Hidayat, menyoroti isu SARA yang menjadi potensi kerawanan dalam pemilu serentak. Di lain pihak, hasil penelitian IDI mengungkapkan bahwa isu SARA bukanlah persoalan yang serius. Isu SARA hanya dimanfaatkan dan dikapitalisasi oleh elite politik untuk kepentingan elektoral.¹¹ Selain isu SARA Prof. Syarif Hidayat menyoroti kinerja partai politik. Menurutnya, partai memiliki kinerja yang masih buruk. Hal ini terjadi karena politik gagal menjalankan fungsi partai politik yang seharusnya melekat kepadanya, baik itu fungsi rekrutmen politik yang di dalamnya terdapat mekanisme kaderisasi

⁸ Kosmas Sobon, *Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafata Emmanuel Levinas: Filsafat*, 2018, 28 (1).

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Lembaga Survei Indonesia, *Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo*.

¹¹ Mouliza K.D Sweinstan, " *Membaca Kondisi Politik Indonesia dari Hasil Survei Ahli LIPI*," Pusat Penelitian Lipi, 13/04/2019, 14:54, <http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun-2018/1238-membaca-kondisi-politik-indonesia-dari-hasil-survei-ahli-lipi>.

partai, komunikasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, serta pengatur konflik.¹² Dr. Firman Noor mengafirmasi mengenai kinerja partai politik yang buruk. Ia menambahkan mengenai tantangan demokrasi Indonesia ke depan yang mencakup diskriminasi, oligarki, dan adanya kekerasan terhadap seseorang untuk menjalankan hak politiknya.¹³

Kebutuhan mendesak menjadi perhatian utama Prof. Syamsuddin Haris. Kebutuhan mendesak yang dimaksudkan adalah segera melakukan reformasi partai politik. Menurutnya, peran partai politik sangat signifikan sebagai ujung tombak suksesi kepemimpinan di Indonesia maka partai politik diharapkan dapat memproduksi kader-kader yang kompeten dan mampu mengemban tugas sebagai pemimpin yang memiliki akuntabilitas.¹⁴ Lebih lanjut Prof. Haris mengkritik pemilu serentak 2019 yang membebankan panitia pelaksana pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ia juga menyitir perilaku elite politik yang memanipulasi isu identitas dan isu SARA untuk kepentingan elektoral.¹⁵ Dari hasil diskusi tersebut, LIPI merekomendasikan sebuah sistem yang didasarkan pada hasil riset sebelumnya, disebut dengan sistem integritas partai politik yang memiliki lima aspek utama, yaitu standar etik parpol, demokrasi internal parpol, kaderisasi parpol, sistem rekrutmen, dan sistem tata kelola keuangan parpol yang baik.¹⁶

Astrid S. Susanto-Sunario mengatakan bahwa terdapat jurang kesenjangan yang curam antara

kehidupan politik nyata dan apa yang dicantumkan dalam UUD 1945 serta Proklamasi tertanggal 17 Agustus 1945 mengenai tujuan bangsa Indonesia dalam menyatakan kemerdekaannya.¹⁷ Partai politik tidak pernah mengakui tindakannya yang buruk, seperti praktek politik yang tidak jujur. Media sosial adalah ladang yang subur bagi partai politik untuk mempraktekan politik kotor melalui berita bohong atau hoax. Keberadaan media sosial dimanfaatkan oleh elite politik untuk membeberkan aib lawan politik. Ketika setiap partai politik saling membuka aib lawan politik, maka pada saat yang sama praktik politik sedang sakit. Ujaran kebencian, fitnah, dan cacik maki menjadi mantra untuk menjatuhkan lawan politik. Tentang hal ini dapat disebut sebagai *political cyberbullying*.

Kondisi politik Indonesia sungguh memprihatinkan. Kaum melek huruf, kaum intelek, hanya membatasi kehidupan politik pada tataran peranaan partai politik atau pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia belum melek politik. Singkat kata kecerdasan politik masyarakat Indonesia sangat rendah. Politik bukan hanya sejauh adanya pemilu atau adanya partai politik yang bertarung. Politik mencakup keseluruhan kelangsungan hidup bangsa atau masyarakat.

Narasi Rasa Primordial

Primordial adalah kesadaran ke-Aku-an dan menyangsikan yang lain. Seolah-olah mau mengatakan bahwa

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Astrid S. Susanto-Sunario, “*Visi Sosial Politik, Tantangan dan Kemungkinan Perkembangannya*,” dalam *Visi Sosial Politik Tantangan dan Kemungkinan*, ed. St. Sularto dkk, Yogyakarta: Kanisius, 1999, 111.

hanya “Aku” hanya suku, agama, dan ras milikku, milik golonganku yang paling baik, di luar itu aku menyangsinkannya, aku menolaknya. Yang Lain bukan golonganku jika Yang Lain berbeda dan lain sama sekali denganku. Hal demikian membuat aku mengasingkan Yang Lain yang hidup berdampingan denganku di ruang publik. Dalam etika levinasian ada istilah “Yang Sama” dan “Yang Lain.” Levinas menyebut Yang Sama untuk mengatakan “Aku” (diri/self), yang sekaligus menjadi karakter dari manusia. Yang Sama merupakan sifat atau kecenderungan manusia untuk menarik atau menyerap segala sesuatu yang asing ke dalam diri.¹⁸ Aku berusaha menyerap apapun yang asing di hadapanku termasuk Yang Lain. Penyerapan Yang Lain ke dalam diriku adalah usaha untuk menundukkan atau menguasai Yang Lain dengan gagasan atau kategori-kategori yang telah dibuat.¹⁹ Mereka yang melakukan tindakan diskriminasi dan rasis terhadap orang lain berusaha menguasai orang lain. Mereka membuat narasi besar dengan kategori-kategori tertentu untuk menguasai Yang Lain, misalnya kategori/gagasan penista agama, non pribumi, kafir dan lain sebagainya. Hal yang sama juga terjadi dalam peristiwa penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Hal lainnya misalnya ketika bertemu dengan orang yang berkulit hitam, rambut kriting, wajah sangar pasti dikatakan sebagai preman atau penjahat. Kategori-kategori tersebut sudah menempel dalam pikiran manusia.

¹⁸ Thomas Hidya Tjaya, *Enigma Wajah Orang Lain: Menggali Pemikiran Emmanuel Levinas*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012, hal. 45.

¹⁹ Fawaid, 2013; Thomas Tjaya, 2012, hal 57.

²⁰ Thomas Tjaya, *Op.Cit.*, hal 60.

²¹ Hardiman, *Op.Cit.*, hal 70.

Hasil survei yang dilakukan oleh LSI menunjukkan dengan jelas bahwa kelompok mayoritas Islam setuju agar kelompok minoritas mengikuti aturan kelompok mayoritas. Inilah yang dimaksudkan oleh Levinas dengan gagasan Yang Sama, berusaha menyerap segala sesuatu yang asing di luar diri ke dalam diri sendiri yang merupakan tempat identitas Aku.²⁰ Dampaknya kehadiran Yang Lain mengganggu Aku, maka Aku harus menundukkan, menguasai Yang Lain itu.

Para filsuf modern merefleksikan manusia sebagai “Aku” yang memiliki kesadaran. Kesadaran dipahami sebagai aktivitas rasio yaitu berpikir. Descartes mengatakan bahwa aku adalah aku yang berpikir “*cogito ergo sum.*”²¹ Keberadaanku adalah keberadaan dalam kesadaranku yang penuh. Aku menyadari diriku, aku menyadari duniaku, aku menyadari segalanya tentang aku (Riyanto, 2017).²² Kesadaran ini diperoleh dengan pikiran atau aktivitas rasio yang menyangkal segala sesuatu yang berada di luar aku. Kesadaran cartesian adalah kesadaran tentang “aku.” Ketika aku menyangkal semua hal yang berada di luar “aku” maka aku hanya mengafirmasi eksistensiku. Thomas Hobbes dalam filsafatnya, konsep “jiwa” kehilangan ciri metafisisnya, karena jiwa tidak lagi dipahami sebagai sebuah kenyataan melainkan hasil dari

²² Armada RIyanto, “*Aku Indonesia, Aku Pancasila*” Sebuah Refleksi Kesadaran *Konstruksi Diri*, dalam Tjatur, Dr. Paulinus Yan Olla, dan Dr. Yustinus (ed.), *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural*, Malang: STFT Widya Sasana, 2017.

penginderaan-penginderaan jasmaniah.²³ Konsekuensi dari konsep demikian, Hobbes menggambarkan manusia sebagai sebuah mesin antisosial. Mengapa? Ia menjelaskan bahwa perasaan yang masuk dalam diri manusia adalah masukan-masukan dari luar melalui pancaindranya yang menghasilkan reaksi mendekati dan menjauhi objek.²⁴ Reaksi yang mendekati obyek disebut oleh Hobbes sebagai nafsu, seperti rasa nikmat, gembira, cinta. Sedang reaksi menjauh disebutnya buruk seperti benci, iri hati, kesedihan. Berdasarkan konsep ini, Hobbes kemudian mendefinisikan manusia makhluk yang pada dasarnya ingin memuaskan kepentingannya sendiri, yaitu untuk memelihara dan mempertahankan dirinya dengan mencari nikmat dan mengelak dari rasa sakit.²⁵ Definisi yang demikian tentang manusia menimbulkan persoalan baru yaitu, hasrat ingin mempertahankan diri akan bertabrakan dengan hasrat Yang Lain. Konsekuensinya, manusia akan saling memperebutkan sumber-sumber yang langka untuk mempertahankan apa yang dimilikinya, dan bahkan menguasai atau menaklukkan manusia lain. Dengan demikian manusia akan menjadi makhluk yang egois, bengis dan keji. Hobbes membayangkan keadaan alami (*state of nature*) sebagai solusi untuk meredakan keegoisan, kebengisan dan kekejian manusia. Menurutnya, manusia harus mengadakan kontrak sosial, yaitu semacam perjanjian damai yang menjadi dasar kehidupan sosial.²⁶ Perjanjian itu

membutuhkan lembaga untuk melindunginya atau mengukuhkannya. Lembaga yang dimaksudkan oleh Hobbes adalah negara.

Tata kelola hidup bersama berawal dari politik identitas.²⁷ Identitas dalam hal ini adalah pertanyaan atas diriku sendiri; siapakah aku? Seluruh gambaran yang mengatakan aku adalah identitasku. Dalam konteks ini identitas berkaitan dengan ego, hal yang interior dan imanen. Penegasan atau pengukuhan ego ini, diperkuat dengan adagium Descartes yang mengatakan *cogito ergo sum*. Manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kesadaran. Eksistensiku akan semakin jelas ketika aku menyangkal segala sesuatu yang berada di luar diriku. Inilah yang disebut oleh Descartes sebagai metode kesangsian. Pada tataran ini manusia menutup diri agar tidak terluka atau egonya ditaklukkan.²⁸ Inilah yang dinamakan primordialitas. Mereka ingin mengukuhkan identitas dan tidak mengizinkan Yang Lain berpengaruh dan masuk ke dalam ego mereka.²⁹ Mereka hanya ingin mempertahankan jati diri mereka. Armada Riyanto dalam bukunya “Berfilsafat Politik” mengatakan melangkah jauh mengatasi sekat-sekat primordial berarti identitas diri tidak dimaknai secara personal, melainkan inter-personal, tidak pergolongan atau antar golongan melainkan keseluruhan, tidak agamis, melainkan transendental-kultural-religius, tidak rasial, melainkan cita rasa bangsa, tidak historis dominasi mayoritas melainkan peradaban

²³ Hardiman, *Op.Cit*, hal 70.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014, 39.

²⁸ Armada Riyanto, *Aku dan Liyan*, Malang: STFT Widya Sasana, 2011, hal 25.

²⁹ Bikhu Parek, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hal 43.; Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, *Op.Cit.*,

kehidupan.³⁰ Pengalaman perjumpaan dengan “Yang Lain” bagi manusia merupakan pengalaman yang melukai (vulnerable). Yang Sama (*The Self*) merasa terusik dengan kehadiran Yang Lain (*The Other*).³¹ Dampaknya, Aku tidak nyaman, maka aku harus menguasai Yang Lain. Pengalaman ini yang mendorong mereka untuk membangun sistem pertahanan dengan memperkuat atau mempertebal tembok primordial. Di dalam tembok itu mereka mengembangkan tradisi filsafat yang berpangkal pada aku/ego. Ego manusia dipahami bukan soal aku dalam arti persona/individu, tetapi soal identitas aku sebagai satu daerah, satu wilayah teritorial, golongan karena kesamaan tanah air yang bergerak menuju ke primordial sukuisme. Di sinilah tatanan hidup bersama mulai direduksi ke dalam golongan dalam hal ini berdasarkan kesamaan asal daerah atau suku dan agama. Di dalam ruang hidup bersama terdapat jurang pemisah atau tembok yang membatasi perjumpaan aku dengan “Yang Lain”-Minoritas dan Mayoritas. Tidak ada perjumpaan etis. Justeru tindakan resistensi atau defensif yang terjadi. Dampaknya, imun primordial meningkat dan sensitiv ketika “Yang Lain” berusaha menerobos. Yang Sama berusaha menguasai dengan menyingkirkan dan membuat kategori-kategori tentang Yang Lain. Dengan demikian muncul tindakan diskriminatif dan rasial terhadap Yang Lain di ruang publik.

Kesadaran Relasional Pluralitas

Etika levinasian terletak pada situasi/ruang dimana Aku/Yang Sama

(the self) merasa terusik dan dituntut untuk memberikan tanggapan atas kehadiran orang lain.³² Aku terusik bukan karena orang lain berpakaian tidak sopan, berpenampilan jelek, buruk rupa atau karena kasihan, melainkan karena orang lain adalah manusia yang unik dan berbeda denganku. Gagasan etika tanggung jawab Levinasian memberikan sebuah kesadaran yaitu kesadaran relasional. Aku dan Yang Lain hidup berdamping dan bersama dalam satu ruang yang sama yaitu ruang publik, Indonesia. Tanggung jawab etis levinasian membuka kemungkinan bagiku untuk menerima kehadiran Yang Lain. Aku harus bergerak ke luar dari diriku (transendensi diri) menuju tataran yang lebih tinggi. Yang Lain lebih tinggi dari Aku. Ini yang disebut oleh Levinas relasi asimetris antara aku dengan yang lain. Bagi Levinas Aku tidak hanya berjumpa dengan Yang Lain dalam ruang publik. Aku juga bertemu atau berjumpa dengan pihak ketiga yang disebut Levinas *Le Tiers* (pihak ketiga). Konsep tentang pihak ketiga ini dibangun atas dasar kesadaran keanekaragaman wajah unik dalam tatanan sosial.³³ Aku dalam etika tanggung jawab levinasian adalah subyek relasional yaitu aku yang hidup dan hadir bersama Yang Lain dan pada saat yang sama juga ada pihak ketiga di ruang publik. Yang Lain yang hadir di hadapanku mengharuskanku untuk menerimanya dan pada saat yang sama adalah tanggung jawabku. Armada Riyanto menarasikan kebiasaan orang Jawa yaitu menyediakan air minum air di depan rumah untuk pejalan kaki untuk menggambarkan kesadaran relasional

³⁰ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik, Ibid.*,

³¹ Tjaya, *Op.Cit.*, hal 70.

³² *Ibid.*, hal. 72.

³³ *Ibid.*,

manusia sebagai makhluk sosial.³⁴ Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ada sapaan ajakan yang menyertai kebiasaan melaetakkan air minum di depan rumah. sapaan itu ditujukan kepada siapapun, orang yang sudah dikenal atau untuk orang asing sama sekali. Pius Pandor mengatakan bahwa dalam relasionalitas, persahabatan tidak bertujuan memuliakan diri melainkan sebuah transendensi diri yaitu persahabatan yang beridiri atas Yang Lain dan pluralitas dan relasionalitas sebagai fondasinya.³⁵ Konsekuensinya adalah “Aku” tidak berpusat pada diri sendiri dan tidak mengalami ketakutan atau kehadiran Yang Lain. “Aku” bebas untuk berinteraksi dengan siapapun. Kesadaran relasional ini membawaku keluar dari zonaku untuk menerima dan berjumpa dengan Yang Lain. Aku dalam kesadaran relasional pluralitas bukanlah aku yang didefinisikan oleh Descartes atau oleh Hobbes. Descartes menggambarkan aku dengan berpusat pada diriku dan menyangsikan Yang Lain, sebaliknya Hobbes menggambarkan aku sebagai yang jahat sehingga membutuhkan negara untuk membendung kejahatanku. Dalam konteks hidup di ruang publik Indonesia, keadaran aku adalah kesadaran pluralitas, bahwa aku hidup dan berada bersama dengan Yang Lain yang sama sekali unik dan berbeda denganku.

Kesadaran manusia Indonesia adalah kesadaran relasional pluralitas. Armada Riyanto mengatakan bahwa Aku Indonesia-Aku Pancasila merupakan kesadaran yang langsung mengatakan elaborasi identitas, Indonesia dan Pancasila.³⁶ Identitas ke-Indonesia-an bukan hanya mengatakan wilayah teritorial atau letak geografis, melainkan keseluruhan nilai-nilai di dalamnya, termasuk nilai religius dan kultural. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat plural dan multikultural sebuah realitas yang harus diterima, dirangkul, digeluti, dan diaplikasikan bahwa “Aku” akan selalu berjumpa dan berinteraksi dengan Yang Lain yang berbeda denganku.

Stephanus Ozias Fernandez, dalam bukunya yang berjudul *Citra Manusia Budaya Timur dan Barat* (1990), mengatakan bahwa rasa solidaritas manusia Indonesia tidak dapat diragukan dalam arti bahwa relasi antara individu-individu tidak hanya terikat lingkungan yang sempit tetapi justru meluas.³⁷ Solidaritas akan mungkin terwujud ketika adanya perjumpaan dengan wajah “Yang Lain” dalam hidup bersama.³⁸ Perjumpaan dengan “Yang Lain” mengandaikan adanya tanggung jawab. Artinya aku bertanggung jawab atas kehadiran “Yang Lain” di hadapanku. “Yang Lain” hadir dalam tampak melalui wajahnya yang menderita, polos dan telanjang.³⁹ Wajah demikian seakan

³⁴ Armada Riyanto, *Bertkat dari Liyan*, *Op.Cit.*,

³⁵ Pius Pandor, *Menyoal Persahabatan sebagai Problem Relasionalitas: Sebuah Konstruksi atas Konsep Alteritas Emmanuel Levinas dan Pluralitas Hannah Arendt*, Seri Filsafat Teologi, 2020, hal 66-94, 30 (29): DOI: 10.35312/serifilsafat.v30i29.20

³⁶ Armada Riyanto, *Aku Pancasila, Aku Indonesia*, *Op.Cit.*,

³⁷ Stephanus Fernandes, *Citra Manusia Timur dan Barat*, Ende: Nusa Indah, 1990, hal. 31.

³⁸ Zummy Anselmus Dami, dkk., *The Contribution of Levinas's Conception to the Ethical of Responsibility to the Ethical Encounter Counselor-Counselee*, *International journal of social sciences and humanities*, 2019, 71-83, 3 (2), Doi: 10.29332/ijssh.v3n2.291

³⁹ Fawaid, *Op.Cit.*, Armada Riyanto, *Aku dan Liyan*, *Op.Cit.*,

memaksaku keluar dari egoku dan memintaku untuk merubuhkan tembok primordial. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa menurut pandangan asli Indonesia, manusia hanya mempunyai arti melibatkan diri dalam relasi sosial dengan sesamanya.⁴⁰ Eksistensiku akan diakui jika aku hadir bagi “Yang Lain” dalam bentuk relasi. Relasi ini yang memungkinkan aku untuk menatap wajah “Yang Lain” dengan penuh tanggung jawab terhadapnya.⁴¹ Levinas memahami tanggung jawab sebagai fakta eksistensial dan itulah yang mendorong seseorang untuk selalu bertanggung jawab atas kehadiran “Yang Lain.”⁴²

Fernandez lebih lanjut mengatakan bahwa tujuan dan cita-cita hidup adalah suasana damai dan tenang, kebijaksanaan dan kesederhanaan hidup, manusia Indonesia selalu mau bekerja sama, bergotong royong, bermusyawarah serta bertoleransi dan turut mengambil bagian dalam penderitaan dan kesenangan orang lain.⁴³ Levinas dalam etika tanggung jawab menyerukan hal yang sama. Namun primordialitas tidak mengizinkan perjumpaan etis terjadi. Bangunan primordial terlalu kokoh. Hal ini sangat lumrah dalam kehidupan berpolitik Indonesia. Mayoritas selalu memiliki keinginan untuk menundukkan dan merengkuh minoritas. Sebaliknya minoritas berusaha membuktikan

eksistensi diri mereka di tengah mayoritas. Dampaknya tidak ada titik temu atau perjumpaan etis. Perjumpaan etis terjadi hanya terjadi di dalam ruang primordial, etnis atau suku.⁴⁴ Di ruang publik yang sering terjadi hanyalah konsensus tanpa ada interaksi atau perjumpaan. Aku hanya bertanggung jawab terhadap Yang Lain yaitu yang segolongan denganku. Pola pikir demikian menganut tradisi filsafat modern yang berpangkal pada ego.

Perjumpaan etis dalam tatanan hidup bersama tidak akan terwujud, jika masing-masing individu, kelompok masyarakat membangun tembok pembatas atau membetengi diri. Dalam konteks ini, rasa primordial yang tinggi merupakan tembok pembatas. Aku membatasi diriku untuk berjumpa dengan Yang Lain. Aku tidak berani menatap wajah Yang Lain, karena Yang Lain sama sekali berbeda denganku, Yang Lain itu unik. Dengan demikian aku melindungi diriku dari Yang Lain. Hal ini berbeda dengan pernyataan Simon dalam artikelnya yang berjudul “Yang Lain” yang mengatakan bahwa tanggung jawab etis Levinas menolong kita agar bertanggung jawab atas hidup orang lain. Selanjutnya Kosmas Sobon yang mengatakan bahwa tanggung jawab etis selalu melibatkan eksistensiku dan eksistensi Yang Lain.⁴⁵ Artinya aku

⁴⁰ Fernandes, *Citra Manusia Timur dan Barat*, *Op.Cit.*,

⁴¹ Armada Riyanto, *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, hal. 134.

⁴² Kosmas Sobon, *Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafata Emmanuel Levinas*, *Op.Cit.*,

⁴³ Fernandes, *Citra Manusia Timur dan Barat*, *Op.Cit.*,

⁴⁴ Firdaus, dkk, *Penanaman Nilai-Nilai Multikulturalisme melalui Pendidikan untuk*

Menyiasati Masalah Kultur di Indonesia dan Malaysia. Pendidikan Berkualitas Ke Arah Pembentukan Nilai Dan Peningkatan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, dalam ASEAN Comparative Education Research Network Conference, Oktober 2015. Herdi Sahrasad, *Indonesia dan Akomodasi Multikultural*, Kompas.com, 2017: <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/06/19121881/indonesia.dan.akomodasi.multikultural>

⁴⁵ Sobon, *Op.Cit.*,

menganggap Yang Lain yang berada di hadapanku benar-benar hadir dan merevelasikan dirinya kepadaku.

Pendidikan Politik dan Multikultural

Jean Jacques Rousseau mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, ia menjadi buruk karena pengaruh budaya, dengan demikian ia akan menjadi baik perlu pendidikan. Dalam artikel “*Developing Globally Competent Citizens: The Contrasting Case of The United States and Vietnam,*” Mark A. Ashwill dan Du’o’ng Thi Hoang Oanh, mengusulkan agar setiap warga dunia memperoleh pendidikan kewarganegaraan dunia atau multidimensi.⁴⁶ Tujuannya adalah agar relasi antar manusia terutama antar negara semakin lebih baik karena dapat mengenal budaya satu sama lain. Demikian juga dengan Indonesia. Penting untuk memperoleh pendidikan politik agar masyarakat melek politik dan tidak mereduksi politik dalam kontestasi politik elektoral semata. Menyoroti pendidikan di Indonesia, sesungguhnya sudah ada semuanya. Akan tetapi kurang diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kekacauan juga sering terjadi di bidang pendidikan. setiap kali ganti menteri perndidikan maka kurikulum juga diganti. Bukan pergantian ini jugamerupaka kepentingan politik yang dibalut dengan kepentingan yang lain. Maka dalam hal ini saya menemukan bahwa; pertama-tama perdamaian itu hilang karena ketidaksadaran manusia akan dirinya sendiri. Dalam hal ini memaksudkan bahwa manusia lupa akan

hak dan kewajibannya. Kedua adalah pendidikan Indonesia yang hanya berpusat pada transfer pengetahuan. Dalam hal ini pendidikan Indonesia, hanya menuntut peserta didik hanya sekedar tahu, bukan mengerti. Tahu berarti yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Sedang mengerti memaksudkan bahwa setiap orang mampu berpikir sendiri. Ketiga adalah kurikulum Indonesia kurang memperhatikan pendidikan politik. Pendidikan politik diabaikan. Dampaknya kaum muda atau pelajar kurang mengerti tentang politik. Oleh sebab itu mereka menghalalkan segala cara untuk memenangkan kepentingan politik termasuk memanfaatkan isu agama. Indonesia seakan ingin mempertegaskan idnetitas sebagai negara religius sehingga memasukan isu agama ke dalam isu politik. Kereligiusan Indonesia menjadikan isu agama merupakan *tool* yang paling ampuh dalam memenangkan suatu pertandingan atau kompetisi termasuk di dalam politik dan dunia kerja profesional. Pada saat yang sama isu agama dijadikan penyulut petaka bagi perdamaian.

Siklus setan atau kejahatan akan terputus jika pendidikan terus diberikan kepada anak-anak sejak dini. Pendidikan itu sangat penting untuk mengubah pemikiran yang primitif ke pemikiran yang modern. Pendidikan multikultural harus selalu diberikan kepada anak usia dini. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pandangan yang baik dan benar tentang multikultural. Pendidikan akan menjadi solusi yang tepat untuk mencegah perkembangan intoleransi di

⁴⁶ Mark A. ASHwill dan Du’o’ng Thi Hoang Oanh, *Developing Globally Competent Citizens: The Contrasting Case of The United States and*

Vietnam, dalam Darla K. Deardorff, *The Sage Handbook of Intercultural Competence*, California: Sage Publications, 2009, hal 141-157.

Indonesia. Peristiwa intoleransi terjadi karena gagalnya suatu Negara dalam mendidik warga negaranya.

Dalam suatu negara multikultural seperti Indonesia pendidikan multikultural sangat penting. Pendidikan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir seseorang. Pendidikan multikultural diberikan sejak dini agar pengaruhnya menjadi signifikan bagi perkembangan anak-anak. Hal demikian akan memproduksi manusia yang toleransi. Hal dikarenakan mereka (manusia Indonesia) sudah mengalami pendidikan multikultural dan memahaminya dengan baik.

Cahyadi dalam bukunya "*Paidea*" menulis tentang tahapan formasi keutamaan dalam *Paidea*. Ada tiga tingkatan formasi yang diajukan yaitu, pertama pembentukan karakter moral melalui pendidikan sensibilitas, kedua pembentukan karakter melalui intelektual melalui pendidikan filsafat dan ketiga program *Paidea*. Pertama pendidikan karakter moral melalui pendidikan sensibilitas. Perhatian Platon untuk memulai formasi keutamaan adalah mencari karakter orang-orang yang tepat untuk dididik menjadi filsuf.⁴⁷ Karakter yang dimaksudkan adalah karakter filsuf alamiah (*philophos phusis*). Menurut Platon karakter ini terdapat pada anak-anak yang sejak dini memperlihatkan beberapa gejala tertentu yang menunjukkan kecenderungan kuat secara alamiah atau bakat untuk menjadi filsuf. Dalam *Paidea* tahap dasar ini, kriteria "filsuf alamiah" terarah ke pendidikan anak usia dini dan remaja.⁴⁸

Etika dalam hidup bersama memiliki tujuan yang mulia dan baik. Etika hidup bersama terwujud jika adanya sikap toleransi. Sikap toleransi bukanlah hanya sebatas pada konsep semata melainkan harus sampai ke praksis hidup keseharian manusia.

Toleransi mengandaikan manusia yang berkebudayaan lain memiliki pemahaman yang baik mengenai manusia berkebudayaan yang lain.⁴⁹ Perbedaan budaya kerap dijadikan alat untuk memicu terjadinya peperangan dan permusuhan di antara sesama manusia. Indonesia mengedepankan dan selalu mengkampanyekan toleransi. Akan tetapi usaha selalu mendapat tantangan yang cukup berat. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengajak warga negara Indonesia agar senantiasa terbuka dengan budaya asing. Budaya asing yang dimaksudkan adalah budaya yang berasal dari luar daerah tertentu atau berasal dari negara lain. Fakta yang terjadi adalah sebagian besar warga negara Indonesia belum siap untuk menerima nilai-nilai dari kebudayaan lain dan kerap menganggap nilai-nilai budaya sendiri lebih benar dan lebih baik jika dibandingkan dengan nilai-nilai budaya lain. Dampaknya sikap rasis, fundamental, radikal, primordial terus dikedepankan dan toleransi seolah-olah terus berlari dan menjauhkan diri dari bangsa Indonesia.

Manusia tumbuh dan berkembang dalam budayanya sendiri. Manusia lahir dan ada bersama dengan budaya. Manusia sekarang adalah manusia yang dalam budaya yang sudah ada terlebih

⁴⁷ Hariyanto Cahyadi, *Paidea: Mendidik Warga Negara Menurut Platon*, Yogyakarta: Kanisius, 2017, hal. 217.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

dahulu. Dampaknya, suka atau tidak, senang atau tidak, ia (manusia) harus menghidupi budaya di mana ia dilahirkan. Dengan kata lain ia hadir hanya tinggal memakai apa yang sudah tersedia, dan tidak ikut terlibat dalam memproduksi budaya. Nilai-nilai budayanya sendiri diterima begitu saja tanpa mengolahnya dan kemudian menganggap budaya yang diterimanya itulah yang paling baik.

Pendidikan multikultural adalah sebuah kritikan bagi sistem pendidikan yang Eropasentris dengan muatan nonkultur dari sistem pendidikan yang berlaku (Parekh, 2008).⁵⁰ Pendidikan ini belatarbelakangkan sejarah kejayaan Eropa. Kesuksesan Eropa dijadikan rujukan bagi bangsa berkembang termasuk dalam bidang pendidikan. Akan tetapi kecenderungan dari pendidikan Eropasentris tidak membangkitkan keingintahuan intelektual yang tinggi tentang kebudayaan lain (Parekh, 2008).⁵¹ Pendidikan seperti ini dikenal dengan sebutan pendidikan monokultur.

Pendidikan monokultur ini cenderung mengembangkan arogansi, ketidakpekaan, dan rasisme.⁵² Pendidikan ini mengekang dan memenjarakan individu dalam budayanya sendiri. Ia tidak menerima budaya lain.⁵³ Dampak dari sistem pendidikan seperti ini adalah individu akan selalu merasa terancam jika berhadapan dengan individu berkebudayaan lain. Seandainya pendidikan seperti ini diberikan kepada anak usia dini, maka kata toleransi tidak

akan pernah ada. Dengan demikian sistem pendidikan monokultur jelas tidak baik.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menghadapkan siswa atau peserta didik pada keanekaragaman. Ketika berhadapan dengan keanekaragaman maka seorang siswa mampu menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Adanya kemampuna untuk menghargai, maka pada saat yang sama seorang siswa (individu) mampu menunjukkan sikap toleransi. Seorang individu adalah anggota kmunitas, anggota etnis tertentu dan pada saat yang sama ia adalah anggota masyarakat multikultural. Melalui pendidikan multikultural seorang individu bukan hanya menerima pendidikan humanisasi, sosialisasi, untuk membantunya menjadi warga masyarakat yang baik tetapi ia juga memiliki integrasi antara kapasitas dan sensibilitas intelektual, moral dan kapasitas sensibilitas dan merasa betah dalam dunia manusia yang kaya dan beraneka ragam.⁵⁴ Dengan demikian toleransi dapat terwujud. Itulah etika hidup bersama dalam masyarakat multikultural.

Kesimpulan

Keanekaragaman Indonesia hal yang patut dibanggakan dan pada saat yang menjadi bumerang. Isu keanekaragaman ini kerap dijadikan bahan untuk membangun benteng primordial dalam memenangkan kontestasi politik elektoral. Dari hasil Survei Nasional yang

⁵⁰ Bikhu Parek, *Op.Cit.*,

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Armada Riyanto, *Berfilsafa Politik, Op.Cit.*,

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Bikhu Parek, *Op.Cit.*,

dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, perihal politik, masyarakat mayoritas (Islam), menginginkan agar Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin beragama mayoritas. Tidak mengherankan dalam setiap kontestasi politik elektoral isu primordial selalu dibangun untuk memenangkan pihak tertentu. Pada pilgub DKI Jakarta 2017 lalu dibangunlah narasi pribumi dan non-pribumi serta narasi kafir, hingga tuduhan kasus penistaan agama. Semua ini ditempuh untuk memenangkan kontestasi politik elektoral. Dalam konteks ini, mayoritas ingin menguasai dan menundukan minoritas. Ruang publik hanya menjadi milik mayoritas di mana mereka dengan bebas melakukan apa saja. Di lain pihak minoritas selalu disalah-salahkan jika muncul di publik dengan berbagai kategori-kategori dan gagasan-gagasan primordial.

Etika tanggung jawab levinasian memberikan suatu petunjuk cara hidup ditengah masyarakat plural. Mayoritas-minoritas bukan sebuah perkara yang besar. Etika Levinasian memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam perihal hidup bersama. Orang lain harus dihormati dan dihargai karena ia adalah subyek sama seperti manusia lain. Manusia tidak dipandang dari unsur mayoritas dan minoritas, agama itu atau agama ini, melainkan karena semata ia adalah manusia yang unik dan lain sama sekali. Pemahaman demikian, akan mengendorkan ketegangan politik elektoral dengan isu-isu primordial, dengan isu mayoritas-minoritas, kafir, pribumi dan non pribumi dan lain sebagainya.

Rekomendasi

Tulisan ini merekomendasikan agar setiap orang terutama anak muda memiliki pengetahuan politik. Oleh karena itu pendidikan politik sangat penting untuk diberikan kepada anak muda. Pengetahuan tentang politik yang dimiliki oleh anak muda adalah pengetahuan politik yang sangat sempit. Di lain pihak, Pendidikan Multikultural juga penting untuk konteks Indonesia yang multikultural. Pendidikan politik dan pendidikan multikultural perlu di masukan ke dalam kurikulum nasional. Hal ini bertujuan untuk mendidik warga negara, sehingga mereka melek politik, melek budaya, melek pluralitas dan tidak menganggap mayoritas superior atas minoritas, termasuk dalam kontestasi politik elektoral.

Daftar Pustaka

- Abdiyah, L. (2021). Filsafat Pendidikan Islam: Pendidikan Multikultural. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 24–31.
<https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1827>
- AShwill, Mark A. dan Oanh, Du'o'ng Thi Hoang. (2009). *Developing Globally Competent Citizens: The Contrasting Case of The United States and Vietnam*, dalam Darla K. Deardorff, *The Sage Handbook of Intercultural Competence*, California: Sage Publications.
- Cahyadi, H. (2017). *Paidea: Mendidik Warga Negara Menurut Platon*. Kanisius.

- Dami, Zummy Anselmus, dkk. (2019). *The Contribution of Levinas's Conception to the Ethical of Responsibility to the Ethical Encounter Counselor-Counselee*, International journal of social sciences and humanities, 71-83, 3 (2), Doi: 10.29332/ijssh.v3n2.291
- Firdaus, Anggreta, D. K., & Yasin, F. (2015, October). Penanaman Nilai-Nilai Multikulturalisme melalui Pendidikan untuk Menyiasati Masalah Kultul di Indonesia dan Malaysia. *Pendidikan Berkualiti Ke Arah Pembentukan Nilai Dan Peningkatan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat*.
- Hamudy, N. A. (2019). The 212 Movement in the Ethical Frame of Emmanuel Levinas. *Bina Praja*, 11(2).
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jauhari, A. (2016). Konsep Metafisika Emmanuel Levinas. *YAQZHAN*, 2(1).
- Muthohirin, N. (2019). Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776>
- Parekh, B. (2008). *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Kanisius.
- Putranto, H. (2016). *Ideologi Pancasila Berbasis Mutikulturalisme*. Mitra Wacana Media.
- Riyanto, A. (2011). *Aku dan Liyan*. Malang: STFT Widya Sasana
- _____. (2014). *Berfilsafat Politik*. Kanisius.
- _____. (2015). Berkat dari Liyan dan Kemanusiaan Indonesia. In A. Riyanto (Ed.), *Karifan Lokal-Pancasila: Butir-butir Filsafat Keindonesiaan* (pp. 165–177). Kanisius.
- _____. (2017). “AKU INDONESIA, AKU PANCASILA” Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri. In Dr. A. T. Raharso, Dr. P. Y. Olla, & Dr. Yustinus (Eds.), *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama Di Ruang Publik yang Plural*. STFT Widayasana. <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/65/24>
- Lembaga Survei Indonesia, *Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo*
- Sahasrad, H. (2017, April 6). *Indonesia dan Akomodasi Multikultural*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/06/19121881/indonesia.dan.akomodasi.multikultural>

- Simon, J. C. (2018). “Liyan” dalam Pemikiran Levinas dan Ricouer terkait Prinsip Bermasyarakat. *Indonesian Journal of Theology*, 6(2), 138–162.
- Sitorus, A. S. (2017). Pendidikan Multikultur pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Ijtimaiyah*, 1(1).
- Sobon, Kosmas. (2018) *Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafata Emmanuel Levinas: Filsafat*, 28 (1).